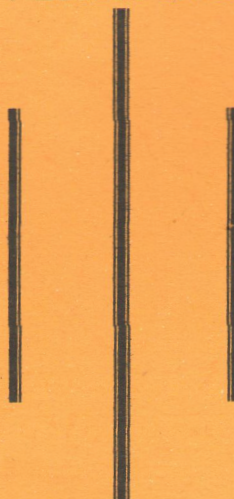




**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN
DUSUN SERTA INSENTIF RT**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2017**



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR **3** TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
SERTA BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN
DUSUN SERTA INSENTIF RT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menirnbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara dan penetapan rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Ayat (5) Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Pemerintah Dusun perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Dusun serta Insentif RT;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Dusun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Dusun Menjadi Rio, Dusun Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Dusun Menjadi Rio, Dusun Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN DUSUN SERTA INSENTIF RT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Bupati adalah Bupati Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.
6. Rio adalah Kepala Pemerintahan Dusun yang dipilih oleh masyarakat Dusun secara langsung.
7. Perangkat Dusun adalah unsur pembantu Rio yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 2

ADD bersumber paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 3

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bersumber dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten kepada Dusun paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bungo.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN DANA

Pasal 4

ADD, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dialokasikan kepada 141 (seratus empat puluh satu) Dusun dalam Kabupaten Bungo dengan Besaran Dana yang diterima oleh setiap Dusun sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Pertama
Alokasi Dana Dusun untuk setiap Dusun

Pasal 5

- (1) Besarnya ADD untuk suatu Dusun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM}_x + \text{ADDP}_x$$

Keterangan:

- ADD_x = Alokasi Dana Dusun untuk Dusun x;
- ADDM_x = Alokasi Dana Dusun Minimal yang diterima setiap Dusun; dan
- ADDP_x = Alokasi Dana Dusun Proporsional untuk Dusun x.

- (2) Untuk menentukan ADDM_x adalah sebagai berikut:

$$\text{ADDM}_x = \text{ADDM} / \text{JD}$$

Keterangan:

- JD = jumlah seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- ADDM = Total Alokasi Dana Dusun Minimal untuk seluruh Dusun, dengan rumus :

$$\text{ADDM} = \text{ADD} \times 60\%$$

- (3) Untuk menentukan ADDP_x adalah sebagai berikut:

$$\text{ADDP}_x = \text{NB}_x \times \text{ADDP}$$

Keterangan:

- NB_x = Nilai Bobot Dusun untuk Dusun tertentu;
- ADDP = Total Alokasi Dana Dusun Proporsional untuk seluruh Dusun, dengan rumus:

$$\text{ADDP} = \text{ADD} \times 40\%$$

- (4) Untuk menentukan nilai bobot suatu Dusun (BD_x) adalah sebagai berikut:

$$\text{BD}_x = \text{Sx1} + \text{Sx2} + \text{Sx3} + \text{Sx4}$$

Keterangan:

- Sx1 = skor luas wilayah Dusun tertentu terhadap luas seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo, dengan rumus:

$$\text{Sx1} = \text{Alx} / \text{B1} \times 0.10$$

Keterangan:

- Ax1 = Luas wilayah Dusun tertentu;
- B1 = Total luas wilayah seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- Sx2 = skor jumlah penduduk Dusun tertentu terhadap jumlah penduduk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo, dengan rumus:

$$Sx2 = A2x/B2 \times 0.25$$

Keterangan:

- Ax2 = Jumlah penduduk Dusun tertentu;
- B2 = Total jumlah penduduk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- Sx3 = skor jumlah penduduk miskin Dusun tertentu terhadap jumlah penduduk miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo, dengan rumus:

$$Sx3 = A3x/B3 \times 0.35$$

Keterangan:

- Ax3 = Jumlah penduduk miskin Dusun tertentu;
- B3 = Total jumlah penduduk miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- Sx4 = skor kesulitan geografis Dusun tertentu terhadap total skor kesulitan geografis untuk Kabupaten Bungo, dengan rumus:

$$Sx4 = A4x/B4 \times 0.30$$

Keterangan:

- Ax4 = Skor kesulitan geografis Dusun tertentu;
- B4 = Skor kesulitan geografis Kabupaten Bungo.

Bagian Kedua

Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah

Pasal 6

Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan:

1. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Dusun; dan
2. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Dusun masing-masing, dengan rumus :

$$E = (Cx1 \times D) / 100$$

Keterangan:

- E = Persentase Penerimaan Pajak atau Retribusi Dusun x (tertentu) terhadap Total Realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo;
- Cx = Persentase Realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi Dusun x (tertentu); dan

- D = Total Realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo;

BAB IV BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Rio dan Perangkat Dusun

Pasal 7

Penghasilan tetap Rio dan Perangkat Dusun dianggarkan dalam APB Dusun yang bersumber dari Alokasi Dana Dusun (ADD).

Pasal 8

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Rio dan Perangkat Dusun:
 - a. Rio sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Dusun sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Kepala Urusan dan Kepala Kampung sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Besaran Honor Bendahara Dusun sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Bagian Kedua Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun

Pasal 9

- (1) Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun adalah tambahan penghasilan Rio dan Perangkatnya diluar penghasilan tetap, dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan Dusun.
- (2) Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun diterima tiap bulannya dengan dianggarkan dalam APB Dusun.
- (3) Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun bersumber dari Alokasi Dana Dusun (ADD) dan/atau Pendapatan Asli Dusun (PAD) dan/atau Pendapatan Dusun lainnya.

Bagian Ketiga Tunjangan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD)

Pasal 10

- (1) Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) berhak menerima tunjangan setiap bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Dusun dan dianggarkan didalam APB Dusun.
- (2) Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) ditentukan dengan batas paling banyak yaitu:
 - a. Ketua BPD Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. Wakil BPD Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

- c. Sekretaris BPD Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- d. Anggota BPD Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Bagian Keempat
Intensif Rukun Tetangga (RT)

Pasal 11

- (1) Rukun Tetangga (RT) berhak menerima intensif setiap bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Dusun dan dianggarkan didalam APB Dusun.
- (2) Besaran insentif RT yaitu paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Besaran Rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tiap Dusun Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Dusun (Add), Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rio serta Perangkat Dusun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 9), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berdaya laku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

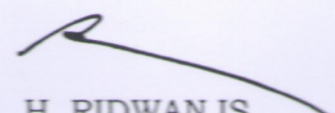
Ditetapkan di Muara Bungo,
pada tanggal *27 Januari* 2017

BURATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal *27 Januari* 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	KECAMATAN	DUSUN	PAJAK	RETRIBUSI	ADD
1	2	3	4	5	6
1	BAT. IV III	Lubuk Benteng	5,223,000	1,392,000	392,540,017
2		Air Gemuruh	5,833,000	1,392,000	449,899,645
3		Purwo Bakti	5,353,000	1,392,000	398,085,245
4		Sarana Jaya	5,101,000	1,392,000	428,629,612
5		Teluk Panjang	5,081,000	1,392,000	520,639,897
SUB-TOTAL			26,591,000	6,960,000	2,189,794,416
1	MUKO - MUKO BA. THIN VII	Mangun Jayo	5,620,000	1,392,000	447,268,278
2		Tanjung Agung	6,994,000	1,392,000	604,110,193
3		Tebat	6,153,000	1,392,000	430,178,538
4		Baru Pusat Jalo	5,391,000	1,392,000	413,158,391
5		Bedaro	7,231,000	1,392,000	620,229,503
6		Tebing Tinggi	5,924,000	1,392,000	488,393,602
7		Datar	5,721,000	1,392,000	394,936,168
8		Suka Jaya	4,991,000	1,392,000	363,776,336
9		Pekan Jum'at	5,099,000	1,392,000	403,382,715
SUB-TOTAL			53,124,000	12,528,000	4,165,433,724
1	JUJAHAN	Tanjung Belit	6,158,000	1,392,000	549,880,010
2		Rantau Ikil	7,052,000	1,392,000	574,627,609
3		Pulau Jelmu	6,016,000	1,392,000	504,881,041
4		Sirih Sekapur	6,928,000	1,392,000	587,041,849
5		Ujung Tanjung	6,163,000	1,392,000	593,856,943
6		Jumbak	5,549,000	1,392,000	453,507,689
7		Rantau Panjang	6,203,000	1,392,000	521,579,792
8		Talang Pamesun	6,551,000	1,392,000	478,738,596
9		Sirih Sekapur Perkembar	5,203,000	1,392,000	473,581,803
10		Baru Balai Panjang	5,048,000	1,392,000	443,109,207
SUB-TOTAL			60,871,000	13,920,000	5,180,804,539

No.	KECAMATAN	DUSUN	PAJAK	RETRIBUSI	ADD
1	2	3	4	5	6
1	PELEPAT ILIR	Koto Jayo	6,632,000	1,392,000	468,821,183
2		Danau	7,871,000	1,392,000	514,794,470
3		Muara Kuamang	6,001,000	1,392,000	443,030,244
4		Lubuk	5,348,000	1,392,000	380,462,906
5		Purwasari	9,284,000	1,392,000	612,995,022
6		Lembah Kuamang	6,435,000	1,392,000	484,202,646
7		Sumber Harapan	6,741,000	1,392,000	545,170,812
8		Daya Murni	5,898,000	1,392,000	470,752,250
9		Sumber Mulia	5,675,000	1,392,000	453,996,525
10		Maju Jaya	5,589,000	1,392,000	452,140,372
11		Tirta Mulya	6,850,000	1,392,000	480,313,701
12		Lingga Kuamang	6,484,000	1,392,000	538,529,091
13		Bangun Harjo	6,217,000	1,392,000	456,383,613
14		Kuning Gading	6,215,000	1,392,000	442,606,914
15		Kuamang Jaya	5,727,000	1,392,000	387,369,085
16		Karya Harapan Mukti	6,173,000	1,392,000	448,287,629
17		Padang Palangeh	6,406,000	1,392,000	486,895,598
SUB-TOTAL			109,546,000	23,664,000	8,066,752,061
1	TANAH SEPENGGAL	Teluk Pandak	5,964,000	1,392,000	453,002,303
2		Empelu	5,917,000	1,392,000	454,541,392
3		Tanah Bekali	5,535,000	1,392,000	456,856,504
4		Pasar Lubuk Landai	5,934,000	1,392,000	501,011,928
5		Sungai Gambir	5,583,000	1,392,000	645,715,599
6		Candi	6,120,000	1,392,000	623,242,791
7		Tanjung	5,469,000	1,392,000	638,015,003
8		Pasar Rantau Embacang	5,383,000	1,392,000	474,103,222
9		Telentam	5,601,000	1,392,000	472,473,832
10		Tenam	5,392,000	1,392,000	425,517,621
SUB-TOTAL			56,898,000	13,920,000	5,144,480,195
1	TANAH SEPENGGAL LINTAS	Sungai mancur	5,710,000	1,392,000	397,973,825
2		Tanah Periuk	7,023,000	1,392,000	505,932,651
3		Lubuk Landai	7,266,000	1,392,000	785,399,859
4		Rantau Embacang	5,845,000	1,392,000	527,618,239
5		Tebing Tinggi	5,360,000	1,392,000	562,663,003
6		Paku Aji	5,478,000	1,392,000	444,996,177
7		Embacang Gedang	6,835,000	1,392,000	421,882,802
8		Sungai Puri	5,210,000	1,392,000	414,425,126
9		Pematang Panjang	5,041,000	1,392,000	407,253,404
10		Sungai Tembang	6,136,000	1,392,000	487,576,263
11		Sungai Lilin	5,983,000	1,392,000	636,230,601
12		Rantau Makmur	4,841,000	1,392,000	444,495,080

1.	KEC. / KANTON	DUSUN	PAJAK	RETRIBUSI	ADD
2.	3.	4.	5.	6.	
1	BATHIN II BABEKO	Tanjung Menanti	5,393,000	1,392,000	394,369,383
2		Simpang Babeko	6,915,000	1,392,000	417,919,256
3		Babeko	5,985,000	1,392,000	443,593,178
4		Sepunggur	6,765,000	1,392,000	495,432,236
5		Suka Makmur	5,374,000	1,392,000	364,349,511
6		Tuo Sepunggur	5,393,000	1,392,000	405,268,787
SUB-TOTAL			35,825,000	8,352,000	2,520,932,351
1	RANTAU PANDAN	Rantau Duku	6,418,000	1,392,000	639,025,590
2		Talang Sungai Bungo	5,463,000	1,392,000	529,767,295
3		Rantau Pandan	7,779,000	1,392,000	533,268,368
4		Leban	5,901,000	1,392,000	551,480,610
5		Lubuk Kayu Aro	5,567,000	1,392,000	461,543,308
6		Lubuk Mayan	5,113,000	1,392,000	438,817,447
SUB-TOTAL			36,241,000	8,352,000	3,153,902,618
1	TANAH TUMBUH	Pedukun	5,600,000	1,392,000	417,826,548
2		Lubuk Niur	5,468,000	1,392,000	434,620,352
3		Teluk Kecimbang	5,408,000	1,392,000	453,011,208
4		Rambah	5,687,000	1,392,000	422,557,829
5		Tebing Tinggi Uleh	5,727,000	1,392,000	494,927,111
6		Bukit Kemang	6,070,000	1,392,000	511,127,891
7		Panjang	5,559,000	1,392,000	441,252,842
8		Koto jayo	5,661,000	1,392,000	415,151,626
9		Renah Jelmu	5,234,000	1,392,000	400,942,342
10		Perenti Luweh	5,490,000	1,392,000	424,627,956
11		Tanah Tumbuh	6,214,000	1,392,000	418,207,301
SUB-TOTAL			62,118,000	15,312,000	4,834,253,006
1	PELEPAT	Baru Pelepat	7,103,000	1,392,000	608,900,941
2		Dwi Karya Bakti	6,034,000	1,392,000	570,490,216
3		Rantau Kelayang	8,276,000	1,392,000	772,150,098
4		Balai Jaya	6,185,000	1,392,000	539,072,654
5		Rantel	5,287,000	1,392,000	536,110,667
6		Senamat	7,750,000	1,392,000	692,244,213
7		Sungai Beringin	6,105,000	1,392,000	514,592,170
8		Sungai Gurun	5,639,000	1,392,000	428,494,758
9		Batu Kerbau	7,835,000	1,392,000	831,950,553
10		Gapura Suci	7,128,000	1,392,000	584,960,088
11		Mulia Bakti	6,142,000	1,392,000	459,355,417
12		Mulia Jaya	5,952,000	1,392,000	472,037,412
13		Cilodang	6,892,000	1,392,000	462,918,491
14		Bukit Telago	4,768,000	1,392,000	413,293,217
15		Sekampil	5,156,000	1,392,000	534,400,599
SUB-TOTAL			96,252,000	20,880,000	8,420,971,494

NO.	KECAMATAN	DUSUN	PAJAK	RETRIBUSI	ADD
1	2	3	4	5	6
1	LIMBUR LUBUK MENGKUANG	Tanjung Bungo	5,239,000	1,392,000	429,129,338
2		Tuo Lubuk Mengkuang	5,218,000	1,392,000	350,479,454
3		Pauh agung	5,582,000	1,392,000	514,787,404
4		Tuo Limbur	5,723,000	1,392,000	467,895,666
5		Renah Sungai Besar	5,515,000	1,392,000	451,111,525
6		Muara Tebo Pandak	5,983,000	1,392,000	462,604,276
7		Rantau Tipu	5,719,000	1,392,000	560,859,246
8		Baru Lubuk Mengkuang	5,200,000	1,392,000	455,404,046
9		Lubuk Tanah Terban	5,512,000	1,392,000	476,509,014
10		Pemunyan	5,889,000	1,392,000	649,250,595
11		Renah Sungai Ipuh	5,835,000	1,392,000	503,917,730
12		Tebo Jaya	5,592,000	1,392,000	461,008,754
13		Sekar Mengkuang	5,920,000	1,392,000	482,767,209
14		Limbur Baru	5,394,000	1,392,000	492,384,406
SUB-TOTAL			78,321,000	19,488,000	6,758,108,663
1	BATHIN II ULU	Muara Buat	6,199,000	1,392,000	478,779,458
2		Buat	6,166,000	1,392,000	560,948,654
3		Laman Pajang	5,450,000	1,392,000	521,651,530
4		Karak Apung	6,029,000	1,392,000	547,316,241
5		Timbolasi	6,398,000	1,392,000	593,284,559
6		Senamat Ulu	5,965,000	1,392,000	556,908,067
7		Aur Cino	5,694,000	1,392,000	485,396,740
8		Lubuk Beringin	5,222,000	1,392,000	450,135,200
9		Sungai Telang	7,154,000	1,392,000	876,709,891
SUB-TOTAL			54,277,000	12,528,000	5,071,130,340
1	JULUHAN ILIR	Tepian Danto	6,170,000	1,392,000	502,869,709
2		Aur Gading	5,364,000	1,392,000	459,838,336
3		Pulau Batu	7,493,000	1,392,000	598,013,065
4		Bukit Sari	7,110,000	1,392,000	546,445,172
5		Sari Mulya	7,507,000	1,392,000	607,060,995
6		Lubuk Tenam	5,312,000	1,392,000	468,085,139
7		Kuamang	5,815,000	1,392,000	486,989,774
SUB-TOTAL			44,771,000	9,744,000	3,669,302,190
1	RIMBO TENGAH	Sungai Mengkuang	6,799,000	1,392,000	656,763,651
2		Sungai Buluh	5,779,000	1,392,000	425,421,525
SUB-TOTAL			12,578,000	2,784,000	1,082,185,176
1	BUNGO DANI	Talang Pantai	6,219,000	1,392,000	453,909,380
2		Sungai Arang	6,396,000	1,392,000	643,056,301
3		Pulau Pekan	5,032,000	1,392,000	372,248,119
SUB-TOTAL			17,647,000	4,176,000	1,469,213,800

No.	KECAMATAN	DUSUN	PAJAK	RETRIBUSI	ADD
1	2	3	4	5	6
1	BATHIN II PELAYANG	Pelayang	6,675,000	1,392,000	613,188,088
2		Peninjau	6,073,000	1,392,000	480,861,769
3		Talang Silungko	5,235,000	1,392,000	443,013,778
4		Pulau Kerakap	6,171,000	1,392,000	453,999,960
5		Seberang Jaya	5,123,000	1,392,000	448,208,602
SUB-TOTAL			29,277,000	6,960,000	2,439,272,197
TOTAL			845,065,000	196,272,000	70,202,983,800

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI